

ABSTRAK

Al Masyhuri Sulfary. 2024. *Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Pembentukan Daerah Otonomi Baru Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Program Studi Hukum, FH, Universitas PGRI Madiun. Pembimbing (I) Dr. Indriyana Dwi Mustikarini, S.H., M.H. (II) Dimas Pramodya Dwipayana, S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis proses pembentukan daerah otonomi baru menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan daerah otonomi baru merupakan salah satu langkah strategis dalam rangka desentralisasi dan peningkatan kualitas pemerintahan daerah. Dalam penelitian ini, dianalisis kriteria utama yang harus dipenuhi, prosedur legislasi, serta peran pemerintah pusat dan daerah dalam pembentukan dan pengelolaan daerah otonomi baru. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur terkait. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa kriteria utama yang harus dipenuhi untuk membentuk daerah otonomi baru, antara lain kriteria administratif, teknis, fisik, dan geografis. Proses legislasi melibatkan pengajuan usulan, persetujuan dari DPRD dan pemerintah pusat, serta pembentukan peraturan daerah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan daerah otonomi baru menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengharuskan adanya kajian kelayakan yang komprehensif, termasuk studi kelayakan dan uji publik. Selain itu, peran pemerintah pusat dan provinsi dalam pembinaan dan pengawasan sangat krusial untuk memastikan keberhasilan daerah otonomi baru. Pengelolaan keuangan dan sumber daya juga diatur secara ketat untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pembentukan daerah otonomi baru memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan publik, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, seperti kendala administratif, hambatan keuangan, dan tantangan sosial-politik. Oleh karena itu, rekomendasi diberikan untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan pembinaan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses ini.

Kata kunci: daerah otonomi baru, desentralisasi, pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

ABSTRACT

Al Masyhuri Sulfary. 2024. *Judicial Review of the Process of Forming New Autonomous Regions According to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government*. Law Department, Universitas PGRI Madiun. Supervisor (I) Dr. Indriyana Dwi Mustikarini, S.H., M.H. (II) Dimas Pramodya Dwipayana, S.H., M.H.

This research aims to examine juridically the process of establishing a new autonomous region according to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The formation of new autonomous regions is one of the strategic steps in the context of decentralization and improving the quality of regional government. In this research, the main criteria that must be met, legislative procedures, and the role of central and regional governments in the formation and management of new autonomous regions are analyzed. The research method used is a normative juridical approach with analysis of statutory regulations, official documents and related literature. This research identifies several main criteria that must be met to form a new autonomous region, including administrative, technical, physical and geographic criteria. The legislative process involves submitting proposals, approval from the DPRD and central government, as well as the formation of relevant regional regulations. The research results show that the process of establishing a new autonomous region according to Law Number 23 of 2014 requires a comprehensive feasibility study, including a feasibility study and public test. Apart from that, the role of the central and provincial governments in guidance and supervision is very crucial to ensure the success of the new autonomous region. Financial and resource management is also strictly regulated to ensure transparency and accountability. This research concludes that although the creation of new autonomous regions has great potential to improve welfare and the quality of public services, there are a number of challenges that need to be overcome, such as administrative obstacles, financial obstacles, and socio-political challenges. Therefore, recommendations are given to strengthen monitoring and guidance mechanisms, as well as increase community participation in this process.

Key words: new autonomous region, decentralization, regional government, Law Number 23 of 2014.